

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK PADA ANAK
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH

LUSIANA PUTRI
NIM. 11724202932

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU - PEKANBARU

1442 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”***

yang ditulis oleh :

Nama : Lusiana Putri
 NIM : 11724202932
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2021 M
16 Syawal 1442 H

Pembimbing Skripsi

Dr. Sofia Hardani, M. Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"* yang ditulis oleh :

Nama : **LUSIANA PUTRI**
NIM : 11724202932
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Murifah, SH., MH

Penguji I
Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

(Handwritten signatures of the examiners)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lusiana Putri (2021): Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus kekerasan fisik pada anak dari waktu ke waktu. Kasus kekerasan pada anak sendiri merupakan masalah krusial, masalah sosial dan merupakan hal yang sangat penting untuk ditangani dan ditindaklanjuti karena anak merupakan aset bangsa. Dalam Islam sendiri pun dijelaskan anak merupakan anugerah dan amanah yang harus di jaga dilindungi, maka keharusan pemerintahlah salah satunya untuk melindungi rakyatnya. Karena menurut *Fiqh Siyasah* kretria pokok bagi seorang Muslim ialah harus melindungi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Diwajibkan untuk menjaga sebagai mana yang telah dikemukakan oleh ulama' dan salah satunya adalah menjaga keturunan, yang mana anak adalah aset penerus dari keluarga, agama, serta negaranya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan , apa saja faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak (UPT PPA) dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data diperoleh dari Kepala UPT PPA dan petugas UPT PPA, data sekunder diperoleh dari dokumen dan bahan- bahan pustaka sedangkan data tersier didapat dari kamus, ensiklopedia, artikel dan sebagainya yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan pustaka. Data dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa UPT PPA dalam penanganan kasus kekerasan fisik pada anak dilakukan dimulai dari proses pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan yang terakhir pendampingan korban dalam prosesnya masih belum maksimal, karena selama proses penanganan ditemui kendala dan faktor yang menghambat dalam proses penanganan. Sedangkan menurut *Fiqh Siyasah* itu belum sepenuhnya sejalan dikarenakan pemimpin adalah orang yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Karena tujuan pemerintah haruslah menjalankan aturan yang telah ditetapkan agar tercapai tujuan yakni kemaslahatan

Kata kunci: Penanganan, Kasus, Kekerasan Fisik, *Fiqh Siyasah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Amrin (alm.)), Ibunda (Nurbaiti) dan abang laki- laki (Idham Khalid, Jum Hari Alkasah dan Fahmi) dan kakak perempuan (Fitri Marlia, Fatmawati, Eli Amrin, dan Ulvia Rahmadhani) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini pada semester delapan ini.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Sekretaris Jurusan Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Zulfikar, M, Ag yang telah banyak mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini
 6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 7. Bapak H. Dr. Erman Ghani, M. Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dan membimbing dalam menjalani proses perkuliahan.
 8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas C angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
 9. Kepada Manisha Dwi Putri, Raudatul Jannah, Dicky Kurniawan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta untuk adik-adik yang memberikan semangat (Nadiatul Husna, Yunia Nurisman, Nabila Amini Nur, Latifa Aini, Vilia Lamdesta, Idzi serta Icisi)
 10. Untuk semua sahabat: Dea Nanda Riskana, Mella Rahmadhani, Sarah Tanasya, Irda Mayanti, Rizky Ramadhan yang tak henti memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
 11. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



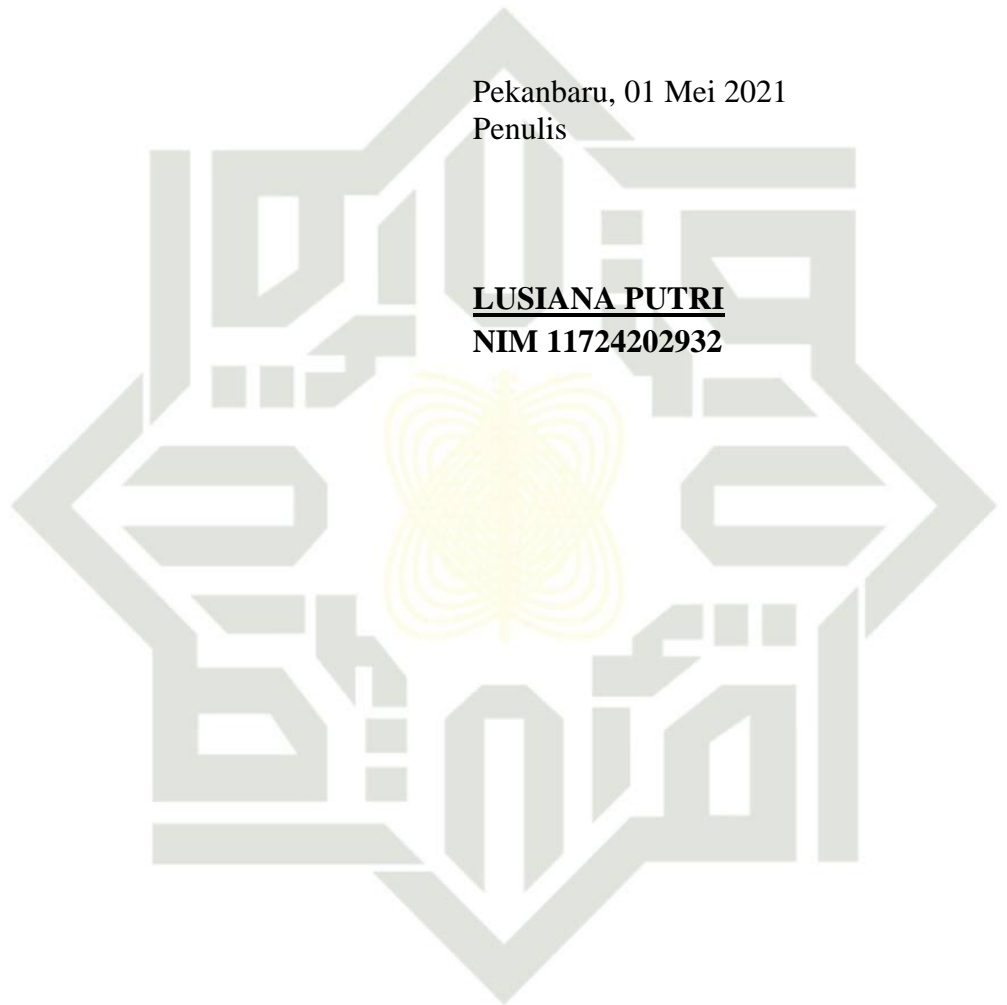
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 Mei 2021
Penulis

LUSIANA PUTRI
NIM 11724202932



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KOTA PEKANBARU	
A. Sejarah Berdirinya.....	19
B. Dasar Hukum dibentuknya UPT PPA	22
C. Tugas dan Fungsi	22
D. Struktur Organisasi	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Penanganan Kasus Anak	27
1. Pengertian Penanganan	27
2. Langkah- langkah Penanganan	28
3. Prinsip – Prinsip Utama Dalam Penanganan Kasus Anak	28
4. Tujuan Penanganan	34
B. Kekerasan Fisik Pada Anak	34
1. Pengertian Kekerasan	34
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Pada Anak	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Terjadinya Kekerasan	36
4. Dampak Kekerasan Fisik Pada Anak	37
C. Hak-Hak Anak	38
1. Pengertian Hak	38
2. Pengertian Anak	39
3. Hak Anak	40
D. Perlindungan Anak Dalam Islam	44
1. Anak Dalam Pandangan Islam	44
2. Hak- hak Anak Dalam Islam	48
E. Konsep Fiqih Siyasah	54
1. Pengertian Fiqh Siyasah	54
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	55
3. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	57

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru	62
B. Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak	75
C. Tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

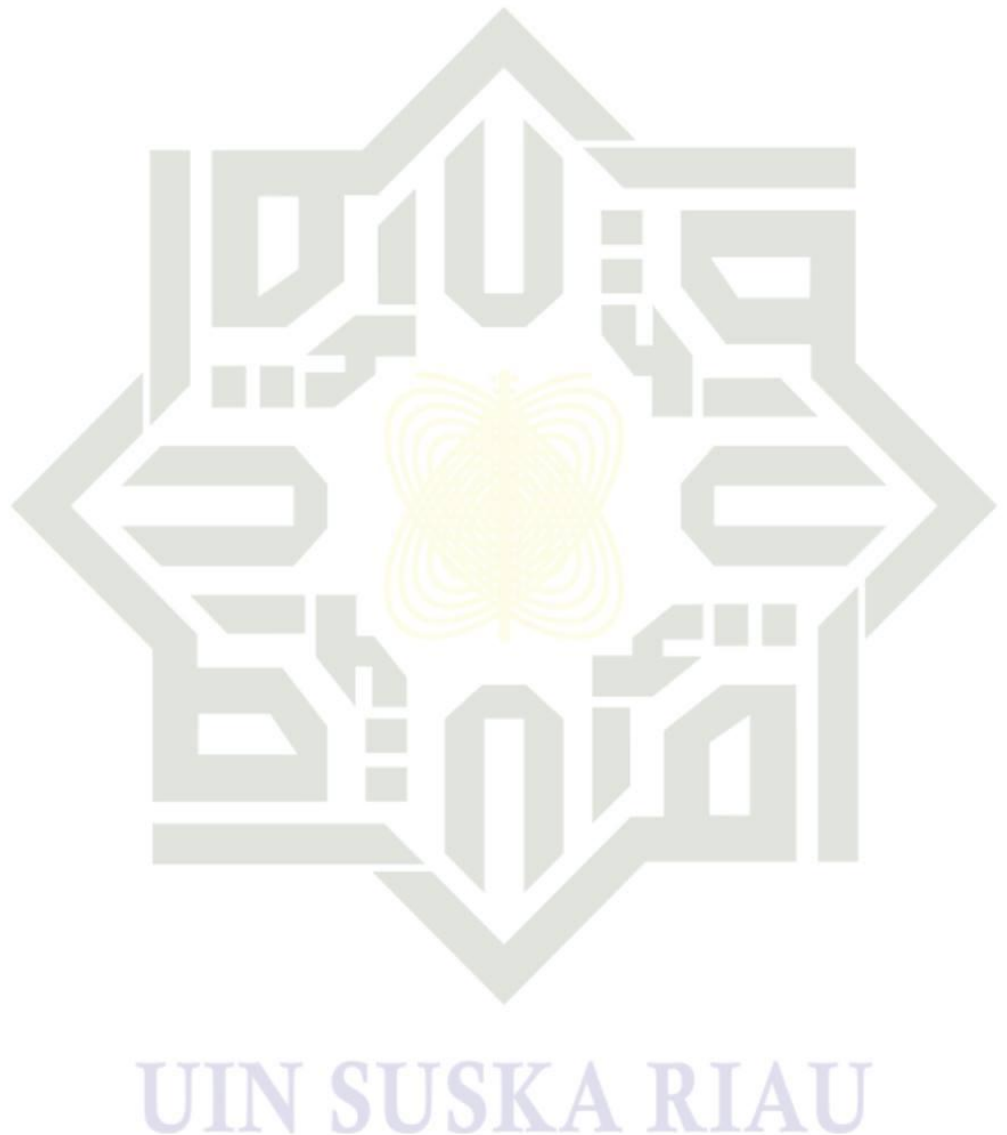
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Di Kecamatan Kota Pekanbaru Tahun 2019	62
Tabel IV.2	Jumlah Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Di Kecamatan Kota Pekanbaru Tahun 2020	63



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang membawa misi luhur, yaitu *Rahmatan lil'alam* (pembawa kebahagiaan bagi sekalian alam), sekaligus sebagai agama tauhid yang menyadari bahwa yang patut disembah hanyalah Allah SWT. Manusia ditugaskan Allah sebagai khalifah di muka bumi, untuk membawa kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian dan kemuliaan di alam¹.

Islam juga membawa rahmat termasuk juga kepada anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan anak dalam hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya². Dalam pandangan Islam anak merupakan amanah Allah, atas kedua orang tua. Untuk itu, orang tua berkewajiban menjaga dan mendidik anaknya supaya selamat dunia dan akhirat.³

Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٠٧﴾

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi* (Bandung : Marja, 2011) hlm. 57

² Pendidikan Agama islam (On-line), tersedia di : <https://zenodo.org/record/1161556/> diakses tanggal 21 Agustus 2020 pukul 19.30

³ M. Hidayat Ginanjar, *Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter anak*, edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam Vol. 02 Januari 2013, hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (Q.S at Tahrir: 6)⁴

Dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah yang harus dijaga dan dilindungi, dan Ayat ini mengingatkan agar setiap keluarga untuk dapat terhindar dari api neraka, dibutuhkan kepedulian orang tua dalam mendidik anak-anak dan mengajarkan ilmu agama sejak usia dini hal tersebut sangatlah dibutuhkan untuk membentuk karakter anak selanjutnya.

Selain sebagai amanah dan fitrah, Islam juga menegaskan anak adalah bunga kehidupan dunia. Penegasan itu dikemukakan dalam sejumlah ayat, yakni: ⁵

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*. (Q.S Al-Kahfi: 46)⁶

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁷ karena

⁴ Kementerian Agama RI, *Al- Fattah*, (Jakarta: Wali, 2013) hlm. 282

⁵ Siti Musdah Mulia, *Op.Cit*, hlm 74

⁶ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 151

⁷ Marulak Pardede, *Aspek Hukum kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, De Jure, Volume 17, Nomor 1, 2017, hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pada pundak mereka nantinya perjuangan diteruskankan serta nasib bangsa akan digantungkan. Anak memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksana pembangunan di masa yang akan mendatang, Jika sebuah bangsa bisa menciptakan anak-anak yang berkualitas, dapat dipastikan proses pembangunan bangsa bisa berjalan dengan baik pada nantinya. Maka dari itu pemerintah harus menyadari mengenai potensi yang dimiliki oleh seorang anak.

Dikatakan seorang anak itu usianya relatif, namun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁸. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan⁹

Dikategorikan anak yang masih di bawah umur, mereka masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak tidak baik bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena masa usia itu mereka dikatakan masih labil sehingga belum bisa menelaah apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk.

Seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak tidak baik bagi dirinya dan

⁸ Lihat UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1)

⁹ Muhammad Taufiq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka cipta), hlm.105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang lain, serta perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi¹⁰. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala bentuk. Bentuk perlindungan terhadap hak anak, diantaranya adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan hukum agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan tidak ada pengecualiannya secara berkelanjutan¹¹

Anak-anak menjadi sosok yang dapat terancam oleh orang dewasa, teman sebaya, dan kekerasan lain. Umumnya pelaku kekerasan pada anak adalah orang terdekat atau orang yang sudah dikenal pelaku. Tapi dapat juga pelaku adalah orang yang tidak dikenalnya sama sekali.

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, dengan tidak mengenyampingkan hak orang tua terhadap seorang anak, yang mana pada anak di bawah umur, orang tua berkewajiban untuk melindungi dan mendidik anak mereka serta bertanggung jawab atas keselamatannya. Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman dan kebutuhan akan perlindungan anak tentu semakin besar membuat kita terdesak untuk berpikir lebih akan hak-hak anak, karena di bahu merekalah nanti masa

¹⁰ Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014, Pasal II

¹¹ Oki Wahyu Budijanto, *Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin*, Deure, Vol. 16, No. 4, 2016, hlm. 465-466.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

depan dunia tersandang. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait¹²

Pemerintah menganggap perlunya dibentuk suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak, dalam upaya untuk menyelesaikan urusan pemerintah maka pemerintah pusat dibantu dengan adanya pemerintah daerah yang lebih dekat dengan urusan rakyat. Kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan asas otonomi. Asas otonomi daerah adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.¹³

Kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan merupakan dampak dari adanya otonomi daerah yang diharapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan dalam mengatur daerahnya.¹⁴ Pemerintah daerah sebagai perwakilan negara yang bertempat di daerah mempunyai kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dalam perlindungan hukum, pasal 8 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah¹⁵ Lahirnya suatu peraturan daerah dimaksudkan

¹² Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 73A

¹³ Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI press , 2001) hlm.101

¹⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.7

¹⁵ Jimly Asshdiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2012) hlm. 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

untuk membantu terlaksananya pemerintahan daerah. Dalam menetapkan peraturan daerah pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk menetapkan suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang di daerahnya.¹⁶ Salah satu dari penyelenggaraan otonomi daerah yaitu mengenai Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Terkait ini sebelumnya telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf b, yang menyatakan: Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.¹⁷

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas penanganan kekerasan terhadap anak , berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terbentuklah Dinas PP-PA Pekanbaru, untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, UPTD PPA berkedudukan di bawah Dinas PP-PA dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. UPTD PPA sendiri menyelenggarakan fungsi layanan:

¹⁶ Jimly Asshique, *Perihal Undang-Undang Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 57

¹⁷ Penjelasan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 angka 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Mediasi; dan
4. Pendampingan korban¹⁸

Kasus Kekerasan terhadap anak sering kali terjadi, Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus).¹⁹

Bentuk- bentuk kekerasan terhadap anak yang sering dialami anak selain seksual adalah kekerasan fisik, ketua UPT PPA mengatakan terdapat 13 kasus di tahun 2019 dan meningkat menjadi 15 kasus pada tahun 2020. Dari data ini menunjukkan adanya peningkatan kasus.²⁰

Hal tersebut seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam hal penanganan kasus kekerasan fisik pada anak adalah UPT PPA kota Pekanbaru. Ketentuan tersebut menunjukkan keaktifan pemerintah dalam memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak hak mereka, guna melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Upaya penanganan bagi anak korban kekerasan anak secara fisik, dengan memberikan dukungan dan meyakinkan anak untuk bisa

¹⁸ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 BAB II Pasal 5

¹⁹ Dokumentasi UPT PPA

²⁰ Dokumentasi UPT PPA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengungkapkan apa yang telah dialami dan rasakan serta menumbuhkan rasa percaya dirinya, meskipun kekerasan yang dialami merupakan kekerasan fisik namun tentu berdampak pula pada psikis. Untuk itu dibutuhkan penanganan khusus oleh psikiater yang mana psikiater dibutuhkan untuk melalui pendampingan korban pada tahap awal.

Dalam Al- Qur'an sendiri tidak dijelaskan bagaimana cara bernegara secara rinci namun dalam Al- Qur'an dijelaskan ide dasar bernegara dan bahwasanya Khalifah merupakan pemimpin dimuka bumi. Dalam hal ini pemerintahan dalam Islam dikenal dengan *siyasah*, *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemasfahatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah tidak menentukannya²¹

Kajian *fiqih siyasah* sendiri mengusahakan atas segala sesuatu kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat dan pada giliran mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip- prinsip syari'ah yang umum atau dalil- dalil yang *kulliy*²²

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kekerasan terhadap anak, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syariat Islam, hukum Islam yang sebagian besarnya bersumber dari wahyu Tuhan dan Sunnah Nabi, dilihat dari konteks praktik jahiliyyah, merupakan suatu revolusi, karena Al- Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam sangat meningkatkan status sosial manusia dan meletakkan norma-norma yang jelas.

²¹ A Dzajuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 42

²² *Ibid.*, hlm 61

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, permasalahan ini berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah* yang merupakan hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sebagaimana Al-Ghazali, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milih rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah SWT.²³

Dari hasil pengamatan yang dilakukan melihat gejala-gejala yang terdapat dalam penanganan kasus kekerasan fisik pada anak di UPT PPA Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Kurangnya bantuan sosial bagi anak korban kekerasan fisik dari keluarga yang kurang mampu, untuk dapat membantu perekonomian anak korban kekerasan fisik pada anak
2. Tidak adanya ruangan khusus anak di UPT PPA
3. Diperlukan pemberdayaan anak yakni dengan pelatihan pada anak agar dia bisa mampu menjadi agen bagi UPT PPA dimasyarakat

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul "Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fiqih Siyasah."

²³Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam* (Jakarta: Erlangga,2008), hlm. 97

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka di perlukan batasan masalah yang akan di teliti nantinya. Penelitian ini di fokuskan kepada Penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru. Maka peneliti membatasi kepada penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru pada tahun 2019 – 2020

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah di atas maka, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak ?
3. Bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak
3. Untuk mengetahui tinjauan *fiqih siyasah* terhadap penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut :

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait kekerasan fisik terhadap perempuan
2. Bagi kegunaan praktis, sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih tentang penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif²⁴ artinya penelitian ini akan di bahas dalam paparan yang di uraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru JL. Dagang No. 78 KP. Tengah Kec. Sukajadi Hotline Service 081277993737.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru.

b. Objek

Adapun objek dalam penelitian ini adalah penanganan kasus kekerasan fisik pada anak di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru

²⁴ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019 cet 1) hlm. 6

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Staf Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru yang berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian dalam menemukan penelitian. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah *total sampling* yaitu pengambilan sampel yang mana peneliti menemukan pengambilan sampel yang mana meneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah secara mendalam. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala UPT PPA kota Pekanbaru, 2 orang petugas *Assemen* UPT PPA kota Pekanbaru, 1 orang Konselor Hukum UPT PPA kota Pekanbaru dan 1 orang Konselor Psikolog UPT PPA kota Pekanbaru

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian obyek penelitian.²⁵ Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru..

b. Sumber Data Sekunder

Data dan sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²⁶ Dalam penelitian ini digunakan sebagai penjelas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa yaitu tentang kekerasan fisik pada anak termasuk bahan-bahan pustaka.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memeberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier ini yaitu kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik Serta Ilmu- ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: kencana, 2005 Ed 2), hlm, 132

²⁶ *Ibid.*,

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁷

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.²⁸ Wawancara merupakan tanya jawaban yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang berkompeten di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diteliti yang terdapat dalam dokumen, data dokumen berupa tulisan atau lukisan (gambar)²⁹

²⁷ Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metode Penelitian penelitian Kualitatif, tindakan dikelas & studi kasus*, (Sukabumi : Cv Jejak, 2017) hlm.72

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008 Cet 26) hlm. 137

²⁹ Didin Fatihudin. Lis Hoslisin, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian* (Pasuruan : Qiara Media, 2019), hlm. 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰

8. Metode Penulisan

Dalam Pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan kemudian diambil satu kesimpulan yang bersifat umum³¹
- c. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil secara khusus

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2015), hlm.244

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.40

G. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku paduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru pada bab ini akan membahas tentang gambaran secara umum tentang lokasi penelitian unit pelaksana teknis perlindungan dan anak

Bab III Tinjauan Teoritis Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian penanganan, prinsip – prinsip utama dalam penanganan kasus anak, pengertian anak, pengertian kekerasan, bentuk- bentuk kekerasan anak, faktor terjadinya kekerasan, dampak kekerasan fisik pada anak, hak- hak anak, perlindungan anak dalam islam, hak hak anak dalam Islam, konsep *siyasa*h.

Bab IV Hasil Penelitian pada bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana dalam Penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh UPT PPA dan kota Pekanbaru dalam perspektif *fiqh siyasa*h.

Bab V Kesimpulan dan Saran bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang berisi tentang kesimpulan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis merupakan harapan penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga ditemukan Bagaimana Penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh UPT PPA kota Pekanbaru berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya

Tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melanggar norma dan hukum negara, kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam peradaban kehidupan manusia. Salah satu kekerasan yang sering terjadi pada anak ialah kekerasan terhadap fisik. Untuk itu perlu menanggapi dan pencegahan tindak kekerasan fisik dan bentuk kekerasan lainnya terhadap anak.

Penanganan kasus- kasus kekerasan baik perempuan dan anak telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat kegiatan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak Korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan SK Walikota nomor 190 pada tahun 2012 tentang pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru. Tiga tahun yaitu pada tahun 2015 setelah di bentuknya P2TP2A keluarlah SK perubahan pengurus P2TP2A kota Pekanbaru.³²

Pada tahun 2018 terbitlah Peraturan Menteri tentang pembentukan UPT PPA, sehingga nama P2TP2A Pekanbaru berubah nama sementara menjadi Unit layanan PPA. Dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan:

³² Dokumentasi UPT PPA Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkatnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan³³

UPTD PPA berada dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota³⁴

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalahnya lainnya.³⁵ UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan :

1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus

³³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bab I ketentuan umum

³⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bab III pasal 4

³⁵ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bab III pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Penampungan sementara
5. Mediasi dan
6. Pendampingan korban³⁶

Setelah satu tahun selang dikeluarkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018. Di tahun 2019 Walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 192 tentang UPT.³⁷ Peraturan Walikota Pekanbaru ini sendiri berisi tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru.. UPT. PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelas A. Ketentuan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan/ atau Kepala Dinas.³⁸

UPT PPA dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT PPA. Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan/ atau pekerja/tenaga profesi lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/ atau Keputusan Kepala Dinas.³⁹

³⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bab III pasal 5

³⁷ Dokumentasi UPT PPA

³⁸ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 BAB III

³⁹ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 BAB III

B. Dasar Hukum Dibentuknya UPT PPA

1. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Peraturan Walikota Pekanbaru No 142. Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota⁴⁰

C. Tugas dan Fungsi

UPT PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus.⁴¹

Kepala UPT PPA

1. Kepala UPT PPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

⁴⁰ Dokumentasi UPT PPA

⁴¹ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 BAB V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksana tugas.
 - b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksana tugas UPT PPA
 - c. Pelaksanaan bimbingan tugas-tugas kepada bawahan pada UPT PPA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
 - d. Pelaksanaan fasilitasi operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksana tugas berjalan efektif dan efisien
 - e. Penyiapan bahan operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien
 - f. Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan UPT PPA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
- h. Penyiaran laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha

3. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja ketatausahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan UPT PPA
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan rumah tangga serta kearsipan
 - c. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pendanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan UPT PPA
 - d. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan pelayanan hubungan masyarakat
 - e. Penyusunan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional UPT PPA
 - f. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala UPT PPA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan bimbingan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Struktur Organisasi

Pengorganisasian UPT PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi UPT PPA. Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai darianggung jawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, dan tenaga profesi yang terlibat di UPT PPA adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak.

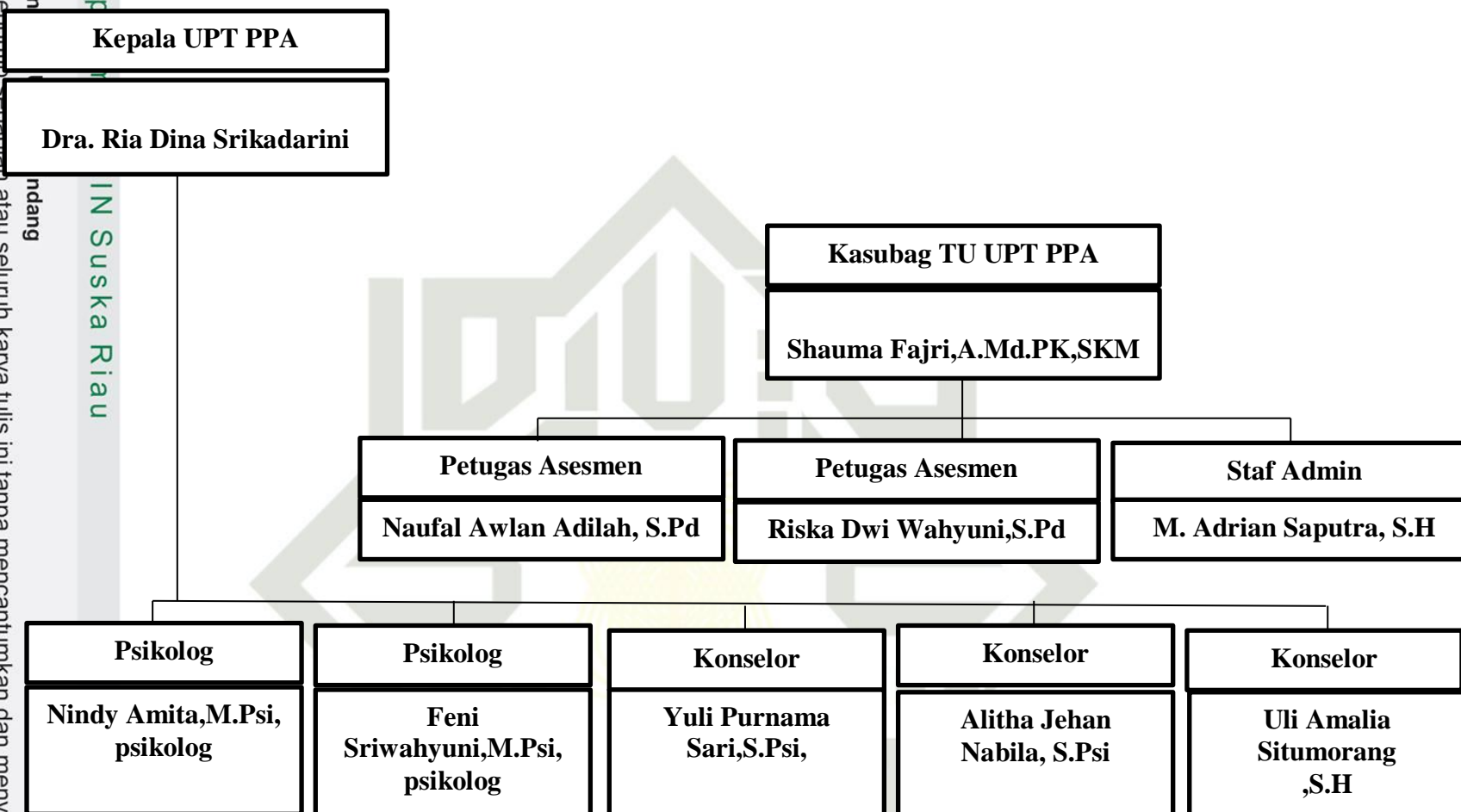
Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) poin d meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, dan Mediator.⁴²

Berikut adalah struktur organisasi UPT PPA Kota Pekanbaru:

⁴² Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 BAB IV

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Penanganan Kasus Anak

1. Pengertian Penanganan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia / kamus versi online/ daring (dalam jaringan), arti kata penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan (suatu kasus)⁴³ Menurut Prayitno, penanganan pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan diakhirinya perhatian tindakan tersebut.⁴⁴ Penanganan kasus meliputi :

- a. Pengenalan awal tentang kasus
- b. Pengembangan ide- ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam kasus
- c. Penjelasan lebih lanjut tentang segala seluk beluk kasus
- d. Mengusahakan upaya- upaya kasus untuk mengatasi atay memecahkan sumber pokok permasalahan itu⁴⁵

Sedangkan Pengertian Kasus menurut kamus besar bahasa Indonesia keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara;

⁴³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penanganan> Diakses Tanggal 30 April 2021

⁴⁴ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar- dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 76

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 77

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

77keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.⁴⁶

2. Langkah- Langkah Penanganan Kasus

- a. Deskripsi awal kasus
- b. Ide- ide tentang rincian permasalahan, kemungkinan sebab dan kemungkinan akibat
- c. Upaya dan hasil penjelajahan lebih lanjut terhadap setiap permasalahan yang terkandung pada kasus yang dimaksud
- d. Upaya penanganan secara khusus terhadap permasalahan pokok yang menjadi sumber permasalahan pada umumnya⁴⁷

3. Prinsip – Prinsip Utama Dalam Penanganan Kasus Anak

- a. Tidak Melakukan Hal Yang Membahayakan Bagi Anak

Memastikan setiap tindakan dan intervensi yang ditujukan untuk anak dan keluarganya tidak membahayakan mereka. Setiap tahapan proses penanganan kasus harus memastikan bahwa anak dan keluarga tidak mengalami dampak yang membahayakan akibat pengambilan keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pekerja sosial atau para professional lainnya.⁴⁸

- b. Prioritas Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak

“Kepentingan terbaik bagi anak” mencakup keselamatan fisik, psikis dan kesejahteraan serta terpenuhinya hak anak. Kepentingan

⁴⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kasus> Diakses Tanggal 30 April 2021

⁴⁷ Prayitno dan Erman Amti., *Loc. Cit.*

⁴⁸ Valentina Gintings, Tata Sudrajat dkk, *Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisiplin yang berpusat pada anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2019) hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbak bagi anak harus melandasi dan memandu semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh penyedia layanan anak dalam proses manajemen kasus.⁴⁹

c. Penanganan Kasus Haruslah Ramah Dan Berpusat Pada Anak

Ramah anak artinya penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan mudah diakses oleh anak. Misalkan dengan memberikan informasi dengan tampilan dan bahasa yang mudah dipahami oleh anak sesuai dengan usianya. Berpusat pada anak artinya dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait penanganan anak dengan cara terpusat pada anak dan sesuai dengan kebutuhan, tahap perkembangan dan hak anak.⁵⁰

d. Non Diskriminasi

Memastikan bahwa anak-anak tidak didiskriminasi (diperlakukan dengan layanan yang buruk atau ditolak) karena karakteristik individu atau kelompok misalnya jenis kelamin, usia, latar belakang sosial ekonomi, ras, agama, etnis, disabilitas, orientasi seksual atau identitas gender.⁵¹

e. Mematuhi Standar Etika Profesi Masing- Masing

Dalam bekerja dengan anak perlu mengikuti dan menerapkan panduan dan praktik etika profesional sesuai profesinya serta mematuhi kebijakan keselamatan anak. Undang- undang kebijakan,

⁴⁹ *Ibid.*, 20

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*, 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma- norma nasional ataupun internasional tentang perlindungan anak harus dihormati.⁵²

f. Mendapatkan Persetujuan atau “*Informed Consent*”

Informed consent artinya adalah kesepakatan sukarela dari seorang individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan, dengan pilihan yang bebas dan terinformasikan. Persetujuan harus diperoleh dari anak dan keluarga atau pengasuh mereka sebelum diberikan pelayanan.⁵³

g. Menjaga Kerahasiaan

Kerahasiaan dikaitkan dengan berbagai informasi yang diperlukan untuk diketahui. Istilah “perlu- tahu” menggambarkan pembatasan informasi yang dianggap sensitif, dan berbagi hanya dengan orang yang membutuhkan informasi untuk melindungi anak. Menghormati kerahasiaan berarti tim penanganan kasus harus melindungi informasi yang dikumpulkan dari klien anak dan keluarganya serta memastikan informasi hanya dapat diakses dengan izin secara tertulis dan langsung dari klien.⁵⁴

h. Memastikan Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab seseorang atas tindakan dan hasilnya. Pihak yang terlibat dalam manajemen kasus bertanggung jawab kepada anak, keluarga, dan komunitas dengan mematuhi hukum nasional, kerangka kebijakan dan kode etik

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*, hlm. 22

⁵⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

professional yang berlaku. Lembaga atau pihak yang mendukung layanan manajemen kasus bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan awal, pengembangan kapasitas, pengawasan untuk memastikan kualitas penanganan yang tepat bagi anak dan keluarga.⁵⁵

i. Memberdayakan Anak dan Keluarga Dengan Membangun Potensi Mereka

Bahwa penilaian anak dan keluarga, memiliki potensi, sumber daya dan keterampilan untuk membantu diri mereka sendiri dan menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Tim penanganan kasus harus bekerja dengan melibatkan anak- anak dan keluarga untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan mereka. Sepanjang proses manajemen kasus, pendamping kasus dan professional yang terlibat mendampingi klien harus fokus pada pemberdayaan anak- anak dan keluarga mereka mengenali, mencegah dan mengatasi masalah serta bagaimana membangun kapasitas mereka untuk merawat diri sendiri⁵⁶

j. Semua Tindakan didasarkan Pada Tahap Perkembangan Anak, Hak Anak dan Perlindungan Anak

Bahwa penilaian dan intervensi harus dilakukan atas dasar pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, hak anak dan perlindungan anak, hak anak dan perlindungan anak, seperti memahami kerentanan dan faktor risiko dan dinamika keluarga.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm, 23

⁵⁶ *Ibid.*, hlm, 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengetahuan tumbuh kembang anak membantu tim penanganan kasus dalam menentukan cara pelibatan dan berkomunikasi dengan anak berdasarkan usia dan kapasitasnya.⁵⁷

k. Memfasilitasi Partisipasi Yang Bermakna

Tim penanganan kasus harus menghormati partisipasi anak, mendengarkan pendapat anak atau bahkan termasuk hak anak untuk tidak menjawab pertanyaan bila mereka merasa tidak nyaman. Partisipasi anak termasuk juga melibatkan anak-anak, dan keluarga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka sendiri. Hal ini sangat penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dan efektif.⁵⁸

l. Menyediakan Proses Dan Layanan Yang Layak Dengan Mempertimbangkan Kultur Setempat

Kepekaan budaya juga meningkatkan kapasitas tim penanganan kasus untuk bekerja secara efektif dengan anak-anak, mengidentifikasi solusi dengan memanfaatkan perlindungan dan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan anak-anak dan keluarga. Tanpa mempertimbangkan konteks budaya, kualitas layanan penanganan kasus dapat terhambat, mengarah pada pengembangan rencana kasus yang tidak sesuai dengan realitas kehidupan dan keyakinan masyarakat dan mungkin tidak dapat diterima serta sulit diterapkan. Ketika kepentingan terbaik anak bertentangan dengan

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*, hlm, 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai- nilai atau praktik budaya, tim penanganan kasus harus mengutamakan keselamatan anak dan tidak menempatkan anak dalam risiko yang lebih buruk.⁵⁹

m. Koordinasi Dan Kerjasama

Manajemen kasus merupakan proses untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama diantara semua aktor yang memiliki mandat untuk melindungi anak- anak termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, penyedia layanan, LSM, Ormas, dan lembaga internasional.⁶⁰

n. Mengelola Batasan Profesional dan Menghindari Konflik Kepentingan

Batasan pribadi dan professional harus diakui dan dihormati untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin muncul. Misalnya tim penanganan kasus tidak diperbolehkan menangani korban dan pelaku pelecehan seksual secara bersamaan, untuk menghindarkan konflik kepentingan.

o. Mengobservasi Kebijakan dan Hukum Terkait Pihak Yang Wajib Membuat Pelaporan

Lembaga yang bekerja dengan anak harus memiliki kebijakan keselamatan anak yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam segala situasi termasuk kebijakan dalam pelaporan⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*, hlm, 26

⁶¹ *Ibid.*, hlm, 27

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan Penanganan Kasus

Secara umum penanganan kasus anak dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarga serta mencegah berkembangnya masalah menjadi lebih luas atau lebih buruk.

- a. Memastikan anak dan keluarga terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan hak- hak mereka.
- b. Memfasilitasi pelayanan terpadu untuk anak dan keluarga
- c. Menciptakan dan meningkatkan dukungan lingkungan sosial anak dan keluarga dalam mencegah keterpisahan anak dari keluarganya
- d. Meningkatkan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan perlindungan anak guna memberikan pelayanan yang optimal bagi anak dan keluarga serta komunitas lainnya.
- e. Memberikan masukan bagi perumusan kebijakan perlindungan anak⁶²

B. Kekerasan Fisik Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan secara umum dipahami sebagai tindakan perilaku, atau keadaan sosial yang mengakibatkan orang atau kelompok lain menderita, sengsara, terluka, bahkan meninggal dunia, selalu dipandang sebagai tindakan atau perbuatan tidak bermoral, tidak manusiawi, dan merusak basis kehidupan manusia.⁶³

⁶² Ibid., hlm, 66

⁶³ Arianto Nurcahyono, *Kekerasan sebagai fenomena budaya: suatu pelacakan terhadap kekerasan di Indonesia*, Volume XIX No. 3 Juli September 2003 hlm. 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Pada Anak

a. Kekerasan anak secara Fisik

Kekerasan anak secara fisik yaitu : penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka- luka fisik atau kematian terhadap anak⁶⁴

b. Kekerasan anak secara Psikis

Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata- kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi kepada anak.

c. Kekerasan anak secara seksual

Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual)

d. Kekerasan anak secara sosial

Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.⁶⁵

⁶⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, cet 1 edisi IV, 2018) hlm 49

⁶⁵ *Ibid.*, hal 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Terjadinya Kekerasan

Faktor kekerasan bisa sangat kompleks, Hosking menyebutkan bahwa secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berkaitan erat dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan. Sementara itu, faktor sosial merupakan kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan⁶⁶.

Faktor individu dari sisi psikologis, motivasi utama untuk melakukan tindak kekerasan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan digunakan media mengekspresikan perasaan seseorang seperti marah, frustrasi atau sedih. Kesulitan mengontrol emosi sering menjadikan seseorang berbuat kekerasan. Prilaku kekerasan terkadang juga disebabkan karena orang tumbuh di lingkungan dimana kekerasan sering dipertontonkan, sehingga kekerasan dipahami sebagai prilaku yang wajar. Terkadang kekerasan yang dilakukan individu digunakan sebagai cara-cara memengaruhi orang lain untuk mengendalikan situasi.⁶⁷

Beberapa faktor yang melekat pada individu pelaku kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengaruh teman sejawat, kurang perhatian, merasa tidak berharga keberadaannya, pernah mengalami perlakuan buruk, dan menyaksikan kekerasan di rumah atau di luar rumah. Menurut Hosking, faktor utama akan kecenderungan seseorang

⁶⁶ Statistik Gender Tematik- Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia, 2017. (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). hlm. 19

⁶⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berbuat kekerasan adalah kurangnya rasa empati. Meskipun seorang bayi yang lahir dipengaruhi kapasitas empati pada dirinya, akan tetapi tumbuhnya rasa empati tersebut bergantung pada apa yang dia pelajari dan lihat dari reaksi orang dewasa terhadap penderitaan atau rasa sakit orang lain.⁶⁸

Faktor sosial budaya, kondisi sosial budaya yang dapat mendorong terjadinya kekerasan sering merefleksikan adanya ketimpangan sosial atau ekonomi antar kelompok masyarakat⁶⁹

4. Dampak Kekerasan Fisik Pada Anak

Kekerasan Fisik adalah perlakuan fisik baik dengan tangan maupun benda yang mengakibatkan anak mengalami luka, goresan, cacat tubuh bahkan keselamatan jiwanya contoh kekerasan fisik pada anak :

- a. Menampar
- b. Memukul
- c. Mencubit
- d. Menjewe⁷⁰

Dampak dari kekerasan terhadap anak dan masyarakat secara umum bisa serius dan membahayakan baik dalam jang waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Menurut Voilence Prevention Intiative (2009), kekerasan yang dialami oleh anak dalam berbagai jenisnya akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.20

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Suzie Sugianto, *Cegah Kekerasan Pada Anak* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan fisik anak. *Violence Prevention Initiative* (2009) mencoba memahami kekerasan yang terjadi pada anak dengan melihat dampak yang diakibatkan dari setiap jenis kekerasan.

Kekerasan Fisik :

- a. Adanya luka lebam, bekas gigitan atau patah tulang yang tidak terjelaskan
- b. Sering tidak masuk sekolah
- c. Cedera yang ditutup- tutupi
- d. Tampak ketakutan ketika ada kehadiran orang tertentu
- e. Sering lari dari rumah⁷¹

C. Hak-Hak Anak

1. Pengertian Hak

Kepribadian yang utuh tau jati diri seorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap sesuatu nilai yang mendasar dalam dirinya. Nilai ini kemudian meletakkan dasar atau alas bagi kepribadian yang membedakan terhadap manusia lain. Nilai tersebut akhirnya dikenal dengan “ hak” yang dikelompokkan dalam hak asasi manusia.⁷²

2. Pengertian Anak

Anak atau *Juvenale* adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Anak memiliki banyak defenisi, John locke memiliki pandangan bahwa anak merupakan pribadi

⁷¹ Statik Gender Tematik, *Op.Cit*, hlm. 22

⁷² Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Per cet 1 Edisi I , 2016), hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masih bersih dan peka terhadap ransangan- ransangan yang berasal dari lingkungan, Menurut *The Minimum Age Conversetion* Nomor 138 Tahun 1973, anak adalah seseorang yang berusia 15 Tahun kebawah. Sebaliknya dalam *Convention on the Right of the Child* Tahun 1989 yang telah diartikan pemerintahan Indonesia melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 Tahun ke bawah.⁷³ dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan usia anak itu relatif tergantung dari sudut pandang yang mana.

- a. Menurut Kesejahteraan anak Menurut UUD Nomor 4 Tahun 1979

Dalam pasal (1) ayat (2) yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin⁷⁴

- b. Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁷⁵

- c. Menurut Hukum Adat

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak- anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat

⁷³ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta : Deepublish, cet 1 Edisi I 2018), hlm. 10

⁷⁴ Lihat UU Nomor 4 tahun 1979

⁷⁵ Lihat UU Nomor 39 Tahun 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr. R. Soepomo berdasarkan hasil perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri- ciri:

- 1) Dapat bekerja sendiri
 - 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
 - 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri⁷⁶
- d. Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) dikatakan yang dikatakan anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinanan ditegaskan dalam Pasal 330 KUHPerdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) ⁷⁷
- e. Menurut Agama
- Seorang yang dikatakan anak dalam agama adalah yang belum baligh, baligh maksudnya yaitu kedewasaan secara fisik yang ditandai dengan ciri- ciri tertentu.

3. Hak Anak

a. Hak- Hak Anak Menurut Konvensi PBB

Sebagaimana orang dewasa, anak juga memiliki hak yang bersifat asasi yang perlu mendapatkan perlindungan. Hak- hak anak Menurut Konvensi PBB:

⁷⁶ [https:// andibooks.wordpress.com/defenisi-anak/](https://andibooks.wordpress.com/defenisi-anak/) diakses pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 20: 47

⁷⁷ Lihat UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Right*)

Hak kelangsungan hidup adalah hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik baiknya. Untuk menjamin terpenuhinya hak ini, negara berkewajiban menjamin kelangsungan hak kelangsungan hidup, perkembangan anak, serta menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer⁷⁸

2) Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak Perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsian.

3) Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Hak untuk tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Terkait dengan hal ini, hak- hak anak meliputi hak untuk memperoleh informasi , bermain dan rekreasi, kebebasan berpikir dan beragama, mengembangkan kepribadian, memperoleh identitas diri, didengar pendapatnya, serta hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan fisik⁷⁹

⁷⁸ Aris Munandar, *Stop Kekerasan*, (Klaten : Macanan Jaya Cemerlang, 2011) hlm. 37

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya atas segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya. Terkait dengan hak ini adalah :

- a) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
- b) Hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikannya
- c) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung serta
- d) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat⁸⁰

b. Hak Anak menurut UU 23 Tahun 2002

Diatur dalam Pasal 4- 18, yang mana meliputi :⁸¹

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan
- 3) Hak atas beribadah menurut agamanya
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya

⁸⁰ Suhasril, *Op. cit*, hlm. 39

⁸¹ Lihat UU Nomor 23 Tahun 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a) Diskriminasi
 - b) Eskploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c) Penelantaran
 - d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e) Ketidakadilan dan
 - f) Perlakuan salah lainnya
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
 - e) Pelibatan dalam peperangan
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasan hak untuk :
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

D. Perlindungan Anak Dalam Islam

1. Anak dalam Pandangan Islam

Al- Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak- anak, khususnya anak- anak saleh keturunan Nabi. Ada kisah Nabi Ismail dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.⁸²

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya, namun sebaliknya bisa menjadi malapetaka bagi orang tuanya . Karena Allah mengingatkan bahwa selain karunia dan nikmat bagi orang tua anak juga bisa menjadi ujian bagi orang tua bahkan anak bisa menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al- Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak .⁸³

⁸² Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Asas, Vol.6 No. 2, Juli 2014, hlm. 3

⁸³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup Di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al- Qur'an disebutkan, Al- Kahfi ayat : 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*⁸⁴

Ayat diatas menyatakan bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya dan hal lainnya. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika didalamnya terdapat anak.⁸⁵

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Anak dikatakan sebagai penyejuk hati, dikatakan demikian karena ketika memadang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya seperti ungkapan “anakku permataku” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya⁸⁶. Penjelasan ayat yang terdapat dalam Q.S Al- Furqan ayat: 74

⁸⁴ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 151

⁸⁵ Muhammad Zaki, *Op. Cit*, hlm. 3

⁸⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."*⁸⁷

c. Anak sebagai Ujian

Adanya anak merupakan sebuah nikmat yang telah diberikan Allah kepada orang tua, orang tua diuji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan menuju ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya berarti orang tuanya lulus ujian namun sebaliknya jika karena anak ia lalai kepada Allah maka ia gagal dalam ujian dan kegagalan ini harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah kelak.⁸⁸ Sebagaimana firman Allah

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: *Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*⁸⁹

Dalam ayat lain Allah juga mengingatkan setiap orang tua untuk beriman

⁸⁷ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 184

⁸⁸ Muhammad Zaki, *Op. Cit*, hlm. 4

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.*⁹⁰

- d. Anak sebagai Musuh Orang tua

Orang tua yang keliru dan salah mendidik anak- anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya, inilah yang diisyaratkan Al- Qur'an sebagaimana firman Allah⁹¹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri- isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu[1479] Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁹²

Ayat ini memiliki makna bahwasanya anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak tidak lagi menaati orang tuanya atau aturan agama. Sebagai contoh anak sudah terlibat jauh dalam kejahatan dan sulit untuk dihentikan, ketika orang tua menasehati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tua.⁹³

⁹⁰ Ibid., hlm. 279

⁹¹ Muhammad Zaki, *Op.Cit.* hlm. 4

⁹² Kementerian Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 280

⁹³ Muhammad Zaki, *Op.Cit.* hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak- hak Anak dalam Islam

Di antara hak- hak anak dalam pandangan Islam, adalah : ⁹⁴

a. Hak untuk hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang ada dalam kandungan. Banyak ayat Al-qur'an menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri maupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S al- An'am ayat 151⁹⁵:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝١٥١﴾

Artinya: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S al- An'am:151)⁹⁶

Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun.

⁹⁴ Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal al- Afkar, Vol 1 No. 1, Januari 2018 hlm 42

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 42

⁹⁶ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak mendapat pengakuan nasab

Syariat Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari'at Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya.⁹⁷

Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹⁸

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil.

Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.⁹⁹

⁹⁷ Hani Sholihah, *Op.Cit.*, hlm. 44

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Op., Cit* hlm. 210

⁹⁹ Hani Sholihah, *Op.Cit.*, hlm 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hak untuk Mendapatkan Nama yang baik

Syari'at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya.¹⁰⁰ Oleh karena itu, Rasulullah saw, menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama- nama yang baik, sebagaimana sabda: “ *Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama Bapak Kalian. Maka, baguskanlah nama Kalian!*” (HR. Abu Dawud)

d. Hak untuk mendapatkan penyusuan

Setelah anak yang dikandung wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh.¹⁰¹ Ayat- ayat al- Al- Qur'an yang berhubungan dengan hak anak untuk disusui, ternyata juga menjamin hak ibu/ wanita yang menyusui, sehingga tidak akan ada seorang pun yang merasa dirugikan , sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S Al- Thalaq ayat: 6

¹⁰⁰ Ibid.,

¹⁰¹ Hani Sholihah, *Op.Cit*, hlm . 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعُ لَهَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*¹⁰²

e. Hak untuk memperoleh pengasuhan dan perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.¹⁰³ Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam surah At- Tahrim untuk menjaga keluarga dari api neraka yang mana adalah mengajari dan mendidik anak.

f. Hak untuk mendapatkan (Biaya Hidup)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh sibapak. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup unuk isteri dan anaknya, si

¹⁰² Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 281

¹⁰³ Hani Sholihah, *Op.Cit*, hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anaknya.¹⁰⁴ Hal ini dinyatakan oleh Jama'ah

Dari “ Aisyah, bahwasanya Hindun binti ‘ Utbah berkata, “ Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki- laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan) dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah kemudian bersabda, “ Ambillah yang mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anakmu dengan baik”.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran

Dalam menafsirkan Q. S At- Tahrir ayat 6 “ Ali r. a berkata “ Ajari dan didiklah mereka”. Demikian juga al- Hasan menafsirkan dengan “ Suruhlah mereka untuk saat kepada Allah dan ajarkanlah kebaikan kepada mereka”

Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari ibn “ Abbas bahwa para sahabat berkata: “ Ya, Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang mejadi hak orang tua. Maka, apakah yang menjadi hak anak? Rasullulah menjawab: “ membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya.”

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al- Qur'an ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan ditelinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 47

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Hak diperlakukan secara adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam non materi.¹⁰⁶ Islam secara tegas terhadap non diskriminasi anak, dan memerintahkan adil kepada anak- anak sebagaimana firman Allah:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٧٧﴾

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran[354] (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa[355] yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka[356] dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.¹⁰⁷

i. Hak Mendapatkan Perlindungan

Hak anak yang paling utama adalah hak perlindungan, Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi. Ini dimulai dengan memberi tuntutan kepada manusia dalam memilih pasangan hidup.¹⁰⁸ Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

¹⁰⁶ Ibid., hlm. 52

¹⁰⁷ Kementrian Agama RI, *Op., Cit.*, hlm. 50

¹⁰⁸ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, hlm. 77

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹⁰⁹

Kandungan ayat ini memerintahkan kita agar memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan hal lainnya ayat ini mengandung pesan bahwanta adanya kewajiban melindungi anak cucu.

E. Konsep Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari bahasa Arab yaitu *faqaha yafqahu fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam. Sehingga dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.¹¹⁰ Sedangkan kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹¹¹

¹⁰⁹ Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 40

¹¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Preademia Group, cet 1, 2014) hlm.2

¹¹¹ *Ibid.*, hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah “ pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Adapun Ibn manzhur mendefenisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “ pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara”.¹¹²

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹¹³

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subyek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *nash* syariat yang bersifat universal.¹¹⁴ Objek kajian *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, ataupun pengaturan-pengaturan lain yang

¹¹² *Ibid.*, hlm.4

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dikenal beberapa pembedaan *fiqh siyasah*. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* ke dalam delapan bidang, yaitu:¹¹⁵

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik pembuatan peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (politik administrasi negara)
- f. *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Sedangkan menurut Abul Wahhab Khallaf, ada tiga bidang kajian *fiqh siyasah*, yaitu:¹¹⁶

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*

¹¹⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Cet.4, hlm.30

¹¹⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Siyasah Kharijiyyah*

Sementara contoh lain dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang, yaitu:

- a. *Fiqh Dusturiyyah*
- b. *Fiqh Maliyyah*
- c. *Fiqh Dauliyyah*
- d. *Fiqh Harbiyyah*

Berdasarkan perbedaan pembedangan tersebut, pembedangan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.¹¹⁷

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur*

¹¹⁷ H.A.Djazuli, Cet.4, *Op.Cit*, hlm.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.¹¹⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹¹⁹

A.Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A.Jazuli memetakan bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) bai'at, 4) waliyu al-'ahdi; 5) perwakilan; 6) ahlul halli wa al-'aqdi; 7) wuzarah dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah Dusturiyah* meliputi: 1) Konstitusi; 2) legislasi; 3) ummah; 4) *shura* atau demokrasi.¹²⁰

Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup

¹¹⁸ Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, hlm.178

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Press, 2011) hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹²¹ Sumber *fiqh dusturiyyah* adalah sebagai berikut:¹²²

- a. Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an.
- b. Al-hadits terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.
- c. kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya. Sesuai dengan prinsip: “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”.
- d. Hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu di dalam memahami semangat *fiqh dusturi* dan prinsip-prinsipnya.

¹²¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), Cet.1, hlm.73

¹²² H.A.Djazuli, Cet.4, *Op.Cit*, hlm.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis.

Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal sebagai berikut:¹²³

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, hak dan kewajibannya
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya
- c. Kajian tentang *bai'at* dari zaman ke zaman
- d. Kajian tentang *walyul ahdi*
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*
- f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidetil dan parlementer
- h. Kajian tentang pemilihan umum

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* tersebut, mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah serta *maqasid syariah* yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran islam yang tertuang dalam dalil *kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat dalam

¹²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cet.2, hlm.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syari'at islam.¹²⁴

Dapat dilihat penjelasan diatas bahwa dalam *fiqh siyasahnya* yaitu *fiqh siyasah dusturiyyah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.



¹²⁴ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan proses penanganan kasus kekerasan fisik pada anak yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) telah dilaksanakan dengan baik, sebagai unit yang bertanggung jawab dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam hal menangani kasus kekerasan fisik pada anak. Dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak di UPT PPA terdapat alur dalam penanganan yaitu : Pengaduan Masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban dalam menangani kasus

Adapun kendala atau faktor penghambat yang oleh UPT PPA dalam menjalankan tugasnya, yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Dengan pemisahan ruangan mediasi anak yang seutuhnya dipergunakan khusus anak, juga kesulitan ekonomi anak dari kalangan menengah kebawah yang sangat perlu dilakukan peninjauan dan juga kendala dalam pendampingan anak di pihak kepolisian yang mana kepolisian selalu menyarankan untuk dilakukannya mediasi dalam penanganan kasus kekerasan fisik pada anak. Disamping adanya kendala atau hambatan yang diterima tentu juga ada faktor pendorong dalam penanganan kasus kekerasan fisik pada anak yaitu fasilitas yang memadai dengan adanya mobil perlindungan, motor perlindungan, dan rumah aman dan kerjasama yang baik dari masyarakat tentunya dalam pelaporan korban dan adanya layanan hotline 24 jam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) berlandaskan kepada PERWAKO Pekanbaru No. 142 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak. Dari PERWAKO No. 142 inilah pola kerja dan fungsi petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) dijalankan.

Tinjauan *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyasah Dusturiyah*. Dimana permasalahan yang penulis teliti berkaitan dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya dan juga berhubungan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Tujuan pemerintah haruslah menjalankan aturan yang telah ditetapkan agar tercapai tujuan yaitu kemaslahatan. Hasil dari penelitian ini, pemerintah dalam hal ini khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) cukup baik dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak, walaupun terdapat kendala- kendala. Namun itu merupakan hal yang wajar karena setiap organisasi atau pun instansi pastilah memiliki kendala dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh agar penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) dilakukan lebih optimal dan efisien maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) Kota Pekanbaru agar dapat sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanganan kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan fisik pada anak lebih maksimal, serta memisahkan ruangan mediasi anak dan perempuan korban kekerasan serta mengajukan anggaran daerah untuk dapat membantu anak- anak korban kekerasan fisik pada anak dan serta melakukan pelatihan terhadap anak korban kekerasan agar nantinya dapat menjadi agen bagi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di masyarakat.

2. Kepada masyarakat kota Pekanbaru khususnya untuk orang tua/ wali yang mendampingi anak bersikap lebih peduli dan lebih tegas terhadap segala perbuatan tindak kekerasan pada anak agar tidak ada lagi terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan diskriminasi terhadap anak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amad Saebani, Beni. 2015. *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Bandung: Pustaka Setia
- Anrusi Jalani, Imam. 2011. *Imam Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya : IAIN Press
- Asyhidique, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asyhidique, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Rajawali Pers
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik Serta Ilmu- ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: kencana
- Dzajuli,A. 2003. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana
- Didin Fatihudin, Lis Hoslisin. 2019 *Kapita Selektta Metodologi Penelitian* Pasuruan : Qiara Media
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Erman Amti dan Prayitno. 2004. *Dasar- dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Haasis, Syamsudin. 2001. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI press
- Humaerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak* . Bandung: Nuansa Cendekia.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenademia Group
- Kementrian Agama RI.2013. *Al- Fattah*. Jakarta: Wali
- Khamami Zada, Mujar Ibnu Syarif. 2008. *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*. Jakarta: Erlangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lelehan dan Yana Suryana, Vilita Biljana Bernadethe. 2018. *Tinjauan Psikologi dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Deepublish.
- Luthfiyah & Muh Fitrah. 2017. *Metode Penelitian penelitian Kualitatif, tindakan dikelas & studi kasus*. Sukabumi : Cv Jejak
- Muhammad Taufiq Makarao, Muhammad. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka cipta
- Musdah Mulia, Siti. 2011. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi* Bandung : Marja
- Rukin. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia
- P. Wibowo, Antonius. 2019. *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di Sekolah* Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugandhi, R. 1981. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing Surabaya
- Suzie Sugianto, Suzie. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Statistik Gender Tematik Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia, 2017. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Syaodih Sukmadinata, Nana. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tata Sudrajat, Valentina Gintings, dkk. 2019. *Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisiplin yang berpusat pada anak*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Peraturan Perundang- Undangan

Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018

Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak

Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2003

Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

C. Jurnal

M. Hidayat Ginanjar. 2013. *Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter anak* . edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam Vol. 02. hlm 1

Marulak Pardede. 2017 *Aspek Hukum kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*. De Jure, Volume 17, Nomor 1. hlm. 17

Oki Wahyu Budijanto. 2016. *Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin*. De Jure, Vol. 16, No. 4. hlm. 456-566

Aranto Nurcahyono. 2003. *Kekerasan sebagai fenomena budaya: suatu pelacakan terhadap akar kekerasan di Indonesia*. Volume XIX No. 3. hlm.234

Hani Sholihah. 2018. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam* . Jurnal al- Afkar, Vol 1 No. 1. hlm. 42-45

Zaki, Muhammad. 2014. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Asas, Vol.6 No. 2,. hlm. 3

D. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penanganan> Diakses Tanggal 30 April 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kasus> Diakses Tanggal 30 April 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.kompas.com/11/08/14163971/siswa-smp-korban-bully-di-Pekanbaru-mengalami-patah-hidung> diakses pada tanggal 24 Mei

Pendidikan Agama islam (On-line), tersedia di: <https://zenodo.org/record/1161556> / (21Agustus 2020)

[https:// andibooks.wordpress.com/defenisi-anak/](https://andibooks.wordpress.com/defenisi-anak/) diakses pada tanggal 29 Juni 2021

[http://repository . unair. ac.id/38653/](http://repository.unair.ac.id/38653/) diakses pada tanggal 30 Juni

E. Wawancara

Naufal Afwan Adillah, S.Pd, Petugas Assesmen UPT PPA, *Wawancara*, tanggal 25 Juni 2021

Dra. Ria Dina Srikandarini, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, *Wawancara* Pekanbaru, 22 Maret 2021

Riska Dwi Wahyni, S. Pd, Petugas Assesmen UPT PPA *Wawancara* , Pekanbaru, 24 Maret 2021

Uli Amalia Situmorang, S.H, Konselor Hukum UPT PPA, *Wawancara*, Pekanbaru, 29 Maret 2021

Yuli Purnama Sari, S.Psi, Konselor Psikolog UPT PPA, *Wawancara*, Pekanbaru tanggal 22 Maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa semua kasus kekerasan fisik pada anak yang terjadi di pekanbaru di rujuk ke UPT PPA
2. Apakah trauma helling mampu mengatasi dan memperbaiki mental anak ?
3. Bagaimanakah alur pertama kali penerimaan kasus di UPT PPA?
4. Sebagai penerima awal kasus , bagaimanakah petugas assesmen mengarahkan wali korban?
5. Pelaporan seperti apa yang diterima di UPT PPA?
6. Apakah maksud dari satu kasus namun ada dua nama korban?
7. Apa bentuk tindakan pertama kali konselor psikolog dalam penanganan kasus kekerasan fisik pada naka
8. Apakah “ Rumah Aman” yang telah disediakan UPT PPA mampu memberikan perlindungan pada korban kekerasan fisik pada anak?
9. Proses mediasi seperti apa yang diberikan UPT PPA dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak ?
10. Apabila kasus dirujuk ke Pengadilan, pendampingan seperti apa yang diberikan UPT PPA dalam menangani kasus kekerasan fisik pada nak?
11. Apa saja faktor penghambat yang diterima UPT PPA selama menangani kasus kekerasan fisik pada anak ?
12. Apa saja faktor pendorong kinerja UPT PPA dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Dra. Ria Dina Srikadarini,
Kepala UPT PPA kota Pekanbaru



Wawancara dengan Ibu Riska Dwi Wahyuni, S.Pd,
Petugas Assesmen UPT PPA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Yuli Purnama Sari, S.Psi,
Konselor Psikologi UPT PPA



Wawancara dengan Ibu Uli Amalia Sitomarang, S.H,
Konselor Hukum UPT PPA



Wawancara dengan Bapak Naufal Alwan Adilah, S.Pd,
Petugas Assesmen UPT PPA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"* yang ditulis oleh :

Nama : **LUSIANA PUTRI**
 NIM : 11724202932
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Secretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH

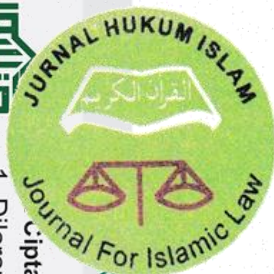
Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalimus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

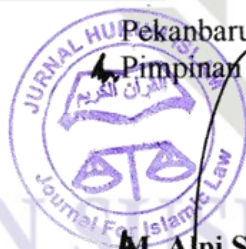
Nama : **LUSIANA PUTRI**
 NIM : **11724202932**
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
 Judul : **PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK PADA ANAK
 OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
 PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM
 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Pembimbing : **Dr. Sofia Hardani, M. Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/2315/2021

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: LUSIANA PUTRI
NIM	: 11724202932
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul :PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH UPT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERWAKO NO 142 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Diiringi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
c. Diiringi menyerahkan dan menyerahkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39091
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/00.F.II/PT.00.9/2315/2021 Tanggal 22 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	LUSIANA PUTRI
2. NIM / KTP	:	11724202932
3. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERWAKO PEKANBARU NO 142 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Februari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kab. Kessbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

Dengan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/678/2021



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/39091 tanggal 26 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : LUSIANA PUTRI
 NIM : 11724202932
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : JL. JATIRASA BARAT NO. 42 KEL. KARANGPAWITAN KEC. KARAWANG BARAT KAB. KARAWANG-JAWA BARAT
 Judul Penelitian : PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERWAKO PEKANBARU NO 142 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
 Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Maret 2021

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

Sekretaris

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710514 199403 1 007



Tembusan

Salinan Asli dan Salinan Fotokopi diserahkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb



Penulis bernama **Lusiana Putri**, dilahirkan di kota Pariaman provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Oktober 1997. Ayahanda bernama Amrin dan Ibunda bernama Nurbaiti Penulis anak terakhir dari delapan bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan SD N 02 Kajai, kota Pariaman dari tahun 2004-2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 5 Pariaman, dari tahun 2010-2013, dan melanjutkan di SMA N 2 Pariaman, dari tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **'PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH'** dibawah bimbingan Dr. Sofia Hardani, M. Ag dan pada tanggal 23 Juni 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dan menyandang gelas Sarjana Hukum (SH).